

HOAX DALAM HAMBATAN VAKSINASI COVID-19 DAN UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENGATASINYA

(Strategi Komunikasi Pemerintah Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 di Kalangan Masyarakat
Kecamatan Tegal Timur)

Shafira Putri Vanessa*), Wijayanto*), Laila Kholid Alfirdaus*)

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah

Website : <https://fisip.undip.ac.id/> — Email : [fisip@undip.ac.id](mailto: fisip@undip.ac.id)

ABSTRAK

Dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19, pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti penerapan protokol kesehatan, Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hingga program vaksinasi covid-19. Dalam hal program vaksinasi covid-19, hingga saat ini masih terdapat beberapa warga Kota Tegal yang masih belum melakukan vaksinasi covid-19. Ini disebabkan pada fase awal pandemi covid-19 banyak blunder dalam komunikasi pemerintah, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi komunikasi Pemerintah Kota Tegal dalam rangka percepatan vaksinasi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data-data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber. Subjek penelitiannya Dinas Kesehatan Kota Tegal, Puskesmas Tegal Timur, serta masyarakat Tegal Timur yang menolak vaksinasi covid-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal beserta jajarannya berupa komunikasi tidak langsung dan langsung dengan melakukan penyuluhan di tempat umum maupun mendatangi rumah warga yang belum melakukan vaksinasi covid-19. Terdapat dua hambatan dalam pelaksanaan komunikasi langsung, yaitu: 1) kurangnya perhatian dari masyarakat karena mereka sibuk dengan aktivitasnya; 2) masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19. Alasan penolakan vaksinasi covid-19 antara lain, minimnya informasi, hoax mengenai efek samping pasca vaksin dan kehalalan vaksinasi covid-19, serta adanya penyakit bawaan. Terdapat beberapa hal yang mendorong masyarakat tersebut akhirnya mau divaksinasi, antara lain: 1) adanya kebutuhan pribadi; 2) dorongan dari pemerintah (sanksi administrasi); 3) kebijakan tempat kerja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan jika komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal telah berhasil. Saran yang disampaikan peneliti adalah perlunya sanksi tegas kepada mereka yang tidak mendukung program pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan memperluas cakupan wilayah agar kesimpulan yang didapatkan memiliki cakupan yang lebih luas.

Kata kunci: komunikasi pemerintah, pandemi covid-19, vaksinasi covid-19, penyuluhan

***) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

****) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**HOAX IN COVID-19 VACCINATION RESISTOR AND GOVERMENT EFFORT TO
TACKLE THE PROBLEM
(Govement's Communication Strategy to Covid-19 Vaccination Resistor in Tegal Timur)**

Shafira Putri Vanessa*), Wijayanto), Laila Kholid Alfirdaus**)**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah
Website : <https://fisip.undip.ac.id/> — Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

There are prevention actions from the government to tackle the covid-19 pandemic, such as health protocols, PPKM, and vaccination. In vaccination program, there are people who haven't take the covid-19 injections due to the upcoming hoax from the government. So that, the trust level from the society is getting lower.

The aim of the research is to explain the government's communication strategies to speed up the covid-19 vaccination. The research method is using descriptive qualitative. Data gathered by interviewing the informants. The research subjects are Dinas Kesehatan, Puskesmas Tegal Timur, including Tegal Timur society who are declined the covid-19 vaccination program.

The research result shows that the communication done by Dinas Kesehatan Kota Tegal are indirect and also a direct communication, including a counseling in public services and visited to the homes of who have not take the covid-19 vaccination. There are two communication obstacles on direct communication: 1) the society have less attention due to their activities, 2) the people who were not taking the vaccine. People who are reject the vaccine mostly exposed by the hoax and has unstable health conditions. There are several reasons when people finally take the vaccine injection: 1) personal needs, 2) goverment encouragement (administrative penalty), 3) work office regulation. Based on the research, communication by the Dinas Kesehatan Kota Tegal is succesful to educate and encourage the society to take the covid-19 vaccination.

The conclusion is, government's communication approach is succeed. The researcher suggest there should be a bold penalty for those who were not follow the government programs. For the future research, researcher is expected to boarden the region for wider research conclusion.

Keywords: govement's communication, covid-19 pandemic, covid-19 vaccination, counseling

***) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

*****) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

A. PENDAHULUAN

Pemerintah dalam menjalankan suatu negara tentu memiliki arah dan tujuan. Untuk mencapainya perlu adanya suatu program atau kebijakan. Setiap program maupun kebijakan yang pemerintah buat juga sudah pasti menimbulkan pro dan kontra. Sama halnya dengan program pemerintah terkait vaksinasi covid-19. Tak sedikit masyarakat yang kontra terhadap program pemerintah tersebut. Padahal jika kita lihat, vaksinasi covid-19 sangat penting di masa pandemi covid-19 yang sudah banyak memberikan dampak negatif di kehidupan. Bukan hanya berdampak pada dunia kesehatan, melainkan juga kehidupan sosial, budaya, hingga ekonomi suatu negara juga terdampak. Program vaksinasi covid-19 ini muncul setelah merebaknya virus covid-19 di Indonesia.

Berkaitan dengan adanya kebijakan pandemi covid-19, tentunya pemerintah memerlukan suatu strategi komunikasi yang baik demi tersampainya segala informasi dan kebijakan tersebut. Komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan salah satu bentuk komunikasi krisis. Seperti yang dijelaskan oleh Umami dalam webinar pada hari Rabu (29/7) yang mengusung tema Pemikiran FISIP UI Tentang Masyarakat di Era Kenormalan Baru,

bahwa komunikasi publik dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan dan menjelaskan keputusan dan tindakan publik, menegakkan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui, serta membantu memperkuat sosial (UI, 2020). Pada komunikasi ini pesan harus jelas, sederhana, menarik nalar dan emosi, serta menawarkan berbagai solusi.

Sebelumnya sudah dilakukan penelitian yang membahas mengenai komunikasi pemerintah Indonesia selama pandemi covid-19. Penelitian ini dilakukan oleh Happy Indah Nurlita. Pada penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah bukan merupakan hal baru, namun untuk fungsinya sendiri telah bergeser dari propaganda menjadi komunikasi yang transparan dan melibatkan publik (Nurlita, 2021). Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa media sosial mampu membangun jembatan interaksi antar pihak, terutama di masa pandemi, yang mana masyarakat membutuhkan kepastian informasi yang cepat dan menciptakan partisipasi atau keterlibatan publik dalam penanganan krisis (Nurlita,2021). Namun tentu saja komunikasi di masa pandemi ini pasti akan menghadapi beberapa tantangan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Lembaga

Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), bahwa di fase awal pandemi masih banyak blunder yang dilakukan dalam komunikasi pemerintah. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada fase awal pandemi, sesuai dengan hasil survey INDEF tercatat 66,28% masyarakat Indonesia memperlihatkan respon negatif terhadap komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu (Nurlita, 2021). Komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi masih belum efektif karena adanya inkonsistensi dan tidak siap dalam menangani krisis.

Kota Tegal juga sempat tidak konsisten dalam mengambil kebijakan. Terbukti dengan adanya penerapan *lockdown* yang menuai kontroversi dari berbagai pihak. Banyak yang menilai bahwa Pemerintah Kota Tegal tidak sejalan dan cenderung melawan pemerintah pusat yang sebelumnya menegaskan tidak akan menerapkan *lockdown* seperti negara-negara lain. Seperti yang dijelaskan oleh Wakil Walikota Tegal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/3) bahwa "Pemerintah Kota Tegal tidak melawan pusat, kami *in line* (sejalan) dengan provinsi dan pusat,". Namun sebelumnya pada 21 Maret 2020, Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan *lockdown* untuk mengatasi penyebaran covid-19. Tentu hal ini merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Akhmad Habibullah dkk (Habibullah, Pratiwi, Sari, Putra, & Novanto, 2022), mengenai Komunikasi Pemerintah Dalam Menyebarkan Informasi Protokol Kesehatan Covid-19 Kepada Masyarakat Kota Tegal, dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Kota Tegal telah menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang sudah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, seperti mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, etika batuk dan bersin, dan lainnya. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti ini adalah masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi himbauan untuk melakukan protokol kesehatan tersebut. Pada penelitian tersebut dijelaskan, berdasarkan teori komunikasi Harold Lasswell, peranan komunikasi Pemerintah Kota Tegal dinilai masih belum berjalan secara optimal serta masih banyak yang perlu dievaluasi.

Di fase pasca krisis, komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal berkaitan dengan percepatan vaksinasi covid-19. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Tegal terhadap program pemerintah pusat, melalui Dinas Kesehatan Kota Tegal melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan angka vaksinasi di Kota Tegal. Baik melalui sosialisasi, kampanye melalui media sosial akan pentingnya vaksinasi covid-19, maupun penerapan “kawasan wajib vaksinasi”. Menurut Dinas Kesehatan Kota Tegal, tercatat per 17 Oktober 2021, capaian vaksinasi dosis pertama di Kota Tegal mencapai 98,6% dari sasaran 213.046 jiwa (Setiadi, 2021). Tingkat capaian vaksinasi covid-19 di Kota Tegal sendiri perbulannya dapat dikatakan cukup tinggi. Terbukti dengan capaian vaksinasi covid-19 per Desember 2021 sudah mencapai 104,19% untuk dosis 1 dan 79,28% untuk dosis 2. Keberhasilan ini tentu tak lepas dari kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal demi percepatan angka vaksinasi covid-19. Pemerintah Kota Tegal hingga saat ini masih terus melakukan berbagai upaya tercapainya sasaran vaksinasi di Kota Tegal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal khususnya Dinas Kesehatan adalah dengan sistem jemput

bola, yaitu dengan mendatangi rumah warga yang belum bahkan menolak untuk divaksin covid-19. Warga yang didatangi tersebut akan diberikan edukasi mengenai pentingnya vaksinasi covid-19 dan di tempat tersebut juga jika warga bersedia divaksin, petugas akan langsung memberikan vaksinasi covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya terdapat masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 dengan berbagai alasan. Pemerintah Kota Tegal tentu memiliki strategi tersendiri untuk menangani hal tersebut, salah satunya dengan melakukan kampanye vaksinasi covid-19 kepada masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang membahas mengenai komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal kepada masyarakat Kecamatan Tegal Timur yang menolak vaksinasi covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, metode merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode penelitian

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2021). Penelitian mengenai komunikasi Pemerintah Kota Tegal terhadap masyarakat Kecamatan Tegal Timur yang menolak vaksinasi covid-19 ini nantinya akan mendeskripsikan bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal, khususnya Dinas Kesehatan Kota Tegal dalam mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya vaksinasi covid-19 kepada masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19. Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan dan rumusan permasalahan yang diangkat, maka peneliti menetapkan Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal sebagai situs penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tegal, pejabat Puskesmas Tegal Timur dan beberapa masyarakat Tegal Timur yang menolak vaksinasi covid-19 yang dipilih peneliti dengan menggunakan *purposive sampling* dengan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* merupakan

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya seorang yang dianggap paling tahu tentang hal yang diharapkan (Sugiyono, 2016). Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampling yang sifatnya bergulir sesuai dengan informasi yang diperoleh dari informan kunci. Disini informasi yang didapatkan dari informan kunci digunakan sebagai petunjuk mengenai individu lain yang sekiranya layak dijadikan informan selanjutnya. Dalam penelitian ini, masyarakat Kecamatan Tegal Timur yang menjadi narasumber menggunakan nama samaran sesuai dengan kode etik penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan, arsip maupun dokumen. Sebelum melakukan wawancara, peneliti mula-mula menentukan informan kunci. Informan kunci ini terdiri dari pejabat Dinas Kesehatan Kota Tegal dan pejabat Puskesmas Tegal Timur. Kemudian, informan kunci tersebut dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan informan lain selanjutnya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal dalam rangka percepatan vaksinasi covid-

19. Wawancara juga dilakukan kepada pejabat Puskesmas Tegal Timur yang dinilai lebih sering berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, terdapat 13 warga Tegal Timur yang menolak vaksinasi covid-19 dan saat dilakukan wawancara nama disamarkan sesuai dengan kode etik penelitian.

C. KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA TEGAL

Dalam rangka penanggulangan pandemi covid-19, pemerintah membuat program vaksinasi covid-19. Untuk menyukseskan program ini, perlu adanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi krisis. Komunikasi krisis terdapat 3 tahap, begitu pula pada komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal vaksinasi covid-19. Terdapat tiga fase, yaitu fase pra vaksinasi, masa vaksinasi, dan pasca vaksinasi.

a. Pra vaksinasi, komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan terhadap vaksinasi. Pada fase ini pesan yang disampaikan berupa informasi dasar vaksin terpilih (aman, efektif, halal, *double dose*), bagaimana vaksin melindungi, informasi jenis vaksin,

informasi kelompok prioritas vaksin program tahap 1, 2, dan 3, informasi periode vaksinasi, meluruskan hoax dan rumor, serta himbauan tetap mematuhi protokol kesehatan.

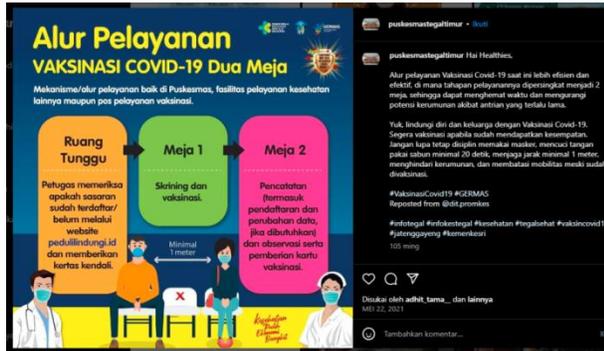
- b. Masa vaksinasi, komunikasi yang dilakukan pada fase ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan vaksin dan perubahan perilaku kunci. Pesan yang disampaikan antara lain, informasi dasar vaksin terpilih, informasi wilayah vaksin, kelompok prioritas, informasi registrasi vaksinasi, persyaratan penapisan, lokasi vaksinasi, himbauan mematuhi protokol kesehatan, informasi mengenai efek samping vaksin dan cara mengatasinya.
- c. Pasca vaksinasi, komunikasi yang dilakukan pada fase ini lebih menekankan supaya masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun sudah melakukan vaksinasi. Komunikasi yang dilakukan pada fase ini juga konsisten dalam memberikan informasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan menggali feedback masyarakat.

Di Kota Tegal, komunikasi dilakukan secara vertikal ke atas, vertikal ke

bawah, maupun horizontal. Sesuai dengan teori komunikasi dari Everett bahwa komunikasi dibabagi menjadi 3 berdasarkan arah alirannya. Dalam kasus program pemerintah mengenai vaksinasi covid-19, Pemerintah Kota Tegal khususnya Dinas Kesehatan Kota Tegal telah berupaya untuk melakukan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal. Komunikasi vertikal ke atas disini maksudnya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal kepada Walikota Tegal. Komunikasi ini memiliki fungsi untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas, keputusan maupun pelaksanaan pekerjaan pada tingkat yang lebih rendah. Komunikasi horizontal maksudnya komunikasi yang dilakukan dalam ruang lingkup pemerintahan itu sendiri. Dalam wawanacara yang dilakukan dengan Ibu Naniem S.KM, M.KM. selaku Kepala Bagian Program Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Tegal pada Senin, 16 Januari 2023, dijelaskan bahwa komunikasi horizontal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal dengan seluruh jajaran dan seluruh kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) melalui rapat koordinasi yang diadakan oleh Walikota Tegal. Ini merupakan langkah awal dan paling utama yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Tegal. Pasalnya vaksinasi covid-19 ini

menyangkut seluruh masyarakat Kota Tegal, sehingga diperlukan campur tangan dari berbagai pihak, baik itu Pemerintah Kota Tegal maupun tokoh publik lainnya. Keterlibatan Walikota Tegal sebagai penggerak ini sudah dimulai sejak tahap 1 vaksinasi covid-19. Dalam instagram @pemkot.tegal juga tampak bahwa pemerintah juga terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 tahap 2 yaitu dengan sasaran ASN, wartawan dan pelayan publik lainnya.

Komunikasi vertikal ke bawah maksudnya adalah komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan beserta jajarannya dengan sasaran komunikasinya adalah masyarakat. Komunikasi ini memiliki fungsi sebagai pengarahan, perintah, indoktrinasi, inspirasi, dan evaluasi. Komunikasi vertikal ke bawah mulai dilakukan setelah diadakannya rapat koordinasi dalam lingkup Pemerintah Kota Tegal. Bentuk komunikasi vertikal ke bawah ini salah satunya adalah dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh puskesmas-puskesmas di Kota Tegal kepada masyarakat Kota Tegal.



Sumber: instagram @puskesmasstegal Timur

Puskesmas Tegal Timur juga mulai memposting informasi terkait vaksinasi covid-19 pada 22 Mei 2021 dengan memberikan informasi kepada masyarakat terkait alur pelayanan vaksinasi covid-19.

Selain teori komunikasi Everett, juga terdapat teori komunikasi Harold Lasswell. Teori komunikasi yang dicetuskan oleh Lasswell ini melahirkan komunikasi politik. Lasswell mendefinisikan komunikasi politik dengan pertanyaan mendasar tentang *who, says what, to whom, via which channels, with what effects* (Hasfi, 2019). Dalam teori ini, komunikasi yang dilakukan bersifat satu arah (*one way communication*), tersentralisasi serta publik atau masyarakat sebagai penerima pesan pasif. Pada awalnya, komunikasi politik dilakukan melalui media tradisional. Namun, dalam praktiknya komunikasi yang dilakukan melalui media tradisional ini memungkinkan terjadinya

hambatan berupa praktik kekuasaan yang dilakukan elemen komunikasi seperti media, *elite*, dan publik tidak berada dalam ruang vakum (Hasfi, 2019). Masing-masing elemen ini memiliki fungsi kontrol yang dapat berpengaruh pada efek pesan yang disampaikan dalam komunikasi politik. Mereka yang memiliki kontrol ialah mereka yang paling banyak menguasai sumber daya terutama *channel*.

Ibu Nanien juga menjelaskan bahwa promosi kesehatan ini ditujukan kepada masyarakat umum yang dilakukan oleh panitia *ad hoc* yang sengaja dibuat untuk berfokus pada vaksinasi covid-19. Ini merupakan bentuk komunikasi vertikal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal. Tidak hanya Dinas Kesehatan Kota Tegal yang melakukan komunikasi kepada masyarakat, puskesmas-puskesmas di Kota Tegal juga mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai vaksinasi covid-19. Dalam penyuluhan tersebut dijelaskan mengenai pentingnya vaksinasi covid-19 di masa pandemi, efek samping yang biasanya terjadi setelah vaksinasi covid-19 hingga sanksi yang akan didapat jika seseorang menolak vaksinasi covid-19. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Susilowati, S. Tr. Keb. selaku Koordinator Bidang Imunisasi Puskesmas Tegal Timur

pada Selasa, 17 Januari 2023, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan komunikasi langsung, tidak hanya Dinas Kesehatan yang melakukan turun lapangan, dari puskesmas-puskesmas di Kota Tegal juga membentuk kepanitiaan khusus untuk melakukan promosi kesehatan. Misalnya seperti di Puskesmas Tegal Timur. Kepanitiaan ini nantinya turun ke lapangan dan bekerja sama dengan bagian kelurahan, bhabinsa, bhabinkamtibmas, RT dan RW. Tak hanya itu, Puskesmas Tegal Timur juga bekerja sama dengan kader posyandu untuk menginformasikan mengenai vaksinasi covid-19. Namun dalam pelaksanaan promosi kesehatan ini tentu terdapat hambatannya. Salah satu hambatan yang cukup berarti adalah masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Puskesmas Tegal Timur bekerja sama dengan berbagai pihak. Adanya sinergitas dengan berbagai pihak ini diharapkan mampu membantu percepatan vaksinasi covid-19, khususnya bagi masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19. Menurut Ibu Nanien, kerjasama dengan TNI-Polri dianggap cukup membantu karena masyarakat dinilai lebih segan dengan pihak tersebut.

Penyuluhan ini bertujuan untuk mempercepat angka vaksinasi di Kota

Tegal. Dalam penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal dan jajarannya, terdapat beberapa hal yang disampaikan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nanien, Beliau menjelaskan bahwa segala keraguan-keraguan maupun isu yang beredar di masyarakat mengenai vaksinasi covid-19 sudah dijelaskan pada saat penyuluhan. Tidak hanya itu, pihaknya juga menjelaskan sanksi yang akan didapatkan jika tidak melakukan vaksinasi covid-19. Memang tidak ada sanksi hukum, tetapi di Kota Tegal menerapkan “Wajib Vaksinasi Covid-19” sebagai syarat pengurusan administrasi di kelurahan.

Komunikasi politik yang dilakukan ini selain memanfaatkan media massa seperti siaran radio dan media sosial, juga melakukan penyuluhan secara langsung. Penyuluhan langsung ini biasanya dilakukan di tempat-tempat umum seperti car free day, pasar, mall, serta datang ke tiap rumah warga yang belum melakukan vaksinasi covid-19. Ibu Susilowati juga menjelaskan bahwa penyuluhan vaksinasi covid-19 dilakukan saat PKK dilaksanakan. Masyarakat yang didatangi oleh pihak puskesmas dan kelurahan ini tentunya mereka yang sudah terjadwal untuk melakukan vaksinasi covid-19 di pos

pelayanan vaksinasi covid-19. Namun, tidak hadir karena menolak untuk divaksin, sehingga vaksinasi covid-19 dilakukan di rumahnya setelah diberikan edukasi mengenai pentingnya vaksinasi covid-19 dan sanksi administrasi yang didapat jika tidak melakukan vaksinasi covid-19. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Susilowati, S.Tr. Keb. terdapat beberapa masyarakat yang tetap menolak untuk divaksinasi covid-19 bahkan setelah didatangi oleh pihak puskesmas dan kelurahan. Alasan mereka menolak untuk divaksinasi covid-19 antara lain karena kepercayaan atau agama, takut akan efek samping yang ditimbulkan pasca vaksinasi covid-19, ada pula yang merasa tidak butuh vaksinasi covid-19.

Terdapat beberapa masyarakat yang tetap menolak untuk divaksin meskipun sudah didatangi dan diberikan edukasi oleh pihak puskesmas dan kelurahan. Menurut Ibu Nanien, nantinya mereka yang tidak divaksin covid-19 akan menyadari pentingnya vaksinasi covid-19, bukan hanya untuk kesehatan tetapi juga dalam mengurus administrasi. Pasalnya vaksinasi covid-19 ini merupakan program pemerintah pusat, jika mereka tidak melakukan vaksinasi covid-19 sama dengan mereka tidak mendukung program pemerintah.

Berdasarkan data cakupan vaksinasi covid-19, strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas mengenai komunikasi yang dilakukan terhadap warga yang menolak vaksinasi covid-19 ini dianggap cukup efektif. Pasalnya hingga awal tahun 2022, capaian vaksinasi covid-19 dosis 1 dan dosis 2 sudah mencapai 100%

D. HAMBATAN KOMUNIKASI PEMERINTAH

Untuk menyukseskan program vaksinasi covid-19, pemerintah memanfaatkan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi tidak langsung yang dilakukan pemerintah misalnya dengan memanfaatkan media seperti siaran radio, koran, maupun media sosial. Sedangkan komunikasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan turun langsung ke posyandu, pertemuan PKK, tempat umum seperti pasar, *car free day*, mall, maupun ke tiap rumah warga. Kegiatan ini dilakukan oleh panitia *ad hoc* yang merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Kota Tegal. Dalam kegiatan ini biasanya terdapat beberapa hal penting yang disampaikan seperti apa itu vaksinasi covid-19, manfaat, efek samping, serta sanksi yang didapat jika tidak melakukan vaksinasi covid-19.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi atau kampanye vaksinasi covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pasti terdapat kendala atau hambatan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nanien dijelaskan bahwa hambatan yang cukup berarti terjadi ketika komunikasi langsung dilakukan. Menurut Ibu Nanien, penyuluhan yang dilakukan di tempat umum berbeda dengan penyuluhan yang dilakukan di kelurahan maupun *door to door*. Memang sulit untuk melakukan penyuluhan di tempat umum, yang mana tiap orang sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Pesan yang disampaikan juga harus singkat, padat, dan tepat sasaran demi tercapainya tujuan kegiatan tersebut.

Menurut Ibu Susilowati, justru kendalanya ada pada masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 itu sendiri. Pasalnya mereka yang menolak sudah pasti memiliki pendapat dan kepercayaan pribadi mengenai vaksinasi covid-19. Bahkan tak sedikit dari mereka sudah termakan hoax yang beredar selama ini. Ini yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sebab sulit untuk meyakinkan mereka yang sudah lebih dahulu termakan hoax. Pihaknya berusaha dengan memberikan edukasi kepada warga yang

menolak vaksinasi covid-19. Bukan hanya dari puskesmas saja yang turun menemui warga, melainkan dari pihak kelurahan, TNI, Polri, juga dari pihak pemerintahan. Namun, untuk hasil akhir dari penyuluhan ini dikembalikan kepada warga. Jika warga tersebut bersedia divaksin, maka akan dilakukan vaksinasi covid-19 di tempat. Begitupun sebaliknya, jika warga tersebut tetap pada pendiriannya, pihak puskesmas beserta jajarannya tidak bisa memaksakan.

E. ALASAN PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19

Dalam pelaksanaannya, vaksinasi covid-19 banyak mengalami kendala di masyarakat. Memang sebagian besar masyarakat Indonesia yang pro terhadap vaksinasi covid-19, namun tak sedikit pula yang menolak vaksinasi covid-19. Seperti yang telah disampaikan dalam buku “Strategi Komunikasi Vaksinasi Covid-19” yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2020 bahwa berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh WHO, Kemenkes RI, ITAGI, dan UNICEF, mayoritas masyarakat Indonesia yaitu sebesar 65% bersedia menerima vaksin covid-19 apabila disediakan oleh pemerintah. Sedangkan 27% lainnya menyatakan ragu-ragu dan 8%

lainnya menolak vaksinasi covid-19 dengan berbagai alasan (Kemenkes, 2020). Tentu hal seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meyakinkan masyarakat yang masih ragu-ragu dan menolak vaksinasi covid-19.

Sejalan dengan program pemerintah pusat ini, Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Kesehatan juga turut menyukseskan program vaksinasi covid-19. Menurut Nanien Indriana, S.KM, M.KM selaku pejabat Dinas Kesehatan Kota Tegal bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), terdapat 3 tahap vaksinasi covid-19. Tahap yang pertama dengan sasaran tenaga kesehatan, tahap kedua dengan sasaran masyarakat lanjut usia dan pejabat publik, tahap terakhir dengan sasaran masyarakat umum. Dalam pelaksanaan vaksinasi ini Beliau juga menjelaskan bahwa terdapat kendala tersendiri ketika mulai memasuki tahap ketiga yaitu dengan sasaran masyarakat umum. Dimana tak sedikit masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya vaksinasi covid-19. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan bahkan menolak anjuran untuk vaksinasi covid-19 dengan berbagai alasan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Tegal khususnya Dinas Kesehatan untuk mengedukasi pentingnya

vaksinasi covid-19 serta meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Tegal untuk melakukan vaksinasi covid-19.

Penulis melakukan wawancara mendalam dengan ibu Susilowati sebagai koordinator imunisasi Puskesmas Tegal Timur. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat yang masih mengabaikan bahkan menolak vaksinasi covid-19 ini memiliki latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda-beda. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pejabat Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ibu Nanien Indriana, S.KM.,M.KM juga menjelaskan bahwa terdapat dua etnis non pribumi yang memiliki pendapat berbeda mengenai vaksinasi covid-19. Etnis pertama sangat pro terhadap program vaksinasi covid-19, sehingga sejak awal Pemerintah Kota Tegal mengkampanyekan vaksinasi covid-19, etnis tersebut langsung mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi covid-19. Sedangkan etnis lain dinilai kontra terhadap program vaksinasi covid-19. Alasan mereka kontra bahkan menolak vaksinasi covid-19 antara lain karena kepercayaan agama, meragukan kehalalan vaksin, takut akan efek setelah dilakukannya vaksin, serta menganggap vaksin bukan satu-satunya cara untuk menghadapi covid-19, sehingga dapat

digantikan dengan cara lain seperti pola hidup bersih dan sehat, olahraga teratur, dan lainnya.

Hingga saat ini masih terdapat beberapa warga Kota Tegal khususnya Kecamatan Tegal Timur yang tidak melakukan vaksinasi covid-19 dan ada beberapa juga yang hanya melakukan vaksinasi covid-19 dosis 1. Dari 13 warga yang diwawancarai terdapat 2 orang yang belum divaksin covid-19, 3 orang yang hanya melakukan vaksinasi covid-19 dosis 1. Narasumber tersebut memiliki alasan berbeda mengenai penolakannya terhadap vaksinasi covid-19 dan alasan mengapa akhirnya mereka bersedia untuk divaksinasi covid-19. Adapun alasannya sebagai berikut, Alasan penolakan vaksinasi covid-19:

1. Hoax mengenai vaksinasi covid-19
2. Minimnya informasi terkait vaksinasi covid-19
3. Tidak percaya vaksinasi covid-19
4. Keraguan mengenai kehalalan vaksinasi covid-19
5. Takut akan efek samping vaksinasi covid-19
6. Adanya penyakit bawaan

Alasan bersedia untuk vaksinasi covid-19:

- a. Kebutuhan pribadi
- b. Dorongan dari pemerintah
- c. Kebijakan tempat kerja

F. KEBERHASILAN

KOMUNIKASI PEMERINTAH

Dari wawancara yang dilakukan kepada 13 narasumber hanya terdapat 2 warga yang belum melakukan vaksinasi covid-19. Bukan karena informasi yang diberikan pihak pemerintah mengenai vaksinasi covid-19 tidak jelas dan tidak mengedukasi, tetapi karena alasan kesehatan dan pilihan pribadi yang membuat keduanya menolak untuk divaksinasi covid-19. Terbukti dengan 11 orang lainnya yang menjelaskan bahwa sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah sudah cukup menjawab keraguan-keraguan mereka terkait vaksinasi covid-19, serta mendorong mereka untuk melakukan vaksinasi covid-19. Walaupun terdapat alasan lain yang menjadi pendorong mereka untuk melakukan vaksinasi covid-19, tetapi sosialisasi dari pemerintah juga penting untuk menjawab keraguan-keraguan yang terjadi di masyarakat.

Seperti yang dijelaskan oleh Mawar dalam wawancara yang dilakukan pada Minggu (2/4), bahwa sebenarnya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal beserta jajarannya sudah cukup jelas. Namun, masih kurang meyakinkan masyarakat untuk sadar vaksinasi covid-19. Pasalnya, hanya

informasi mendasar saja yang disampaikan pada saat penyuluhan, baik di tempat umum, kelurahan maupun saat mendatangi rumah warga yang menolak. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nanien selaku pejabat Dinas Kesehatan Kota Tegal juga dijelaskan bahwa adanya sinergitas antara pemerintah dengan TNI-Polri juga memberikan dampak yang cukup signifikan. Pasalnya TNI-Polri dinilai lebih disegani di lingkungan masyarakat. Kerjasama dengan pihak TNI-Polri juga dilakukan jika ajakan yang telah dilakukan oleh pihak RT, RW, maupun kader di lingkungan tersebut gagal mengajak warganya untuk melakukan vaksinasi covid-19.

Dengan adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal beserta jajarannya, dapat dikatakan berhasil mengajak masyarakat yang awalnya menolak vaksinasi covid-19 menjadi bersedia untuk divaksin. Terbukti dengan 11 dari 13 narasumber yang mulanya menolak vaksinasi covid-19, saat ini sudah melakukan vaksinasi covid-19. Bahkan terdapat 6 narasumber yang sudah melakukan vaksinasi covid-19 dosis booster. Selain itu, ketercapaian angka vaksinasi covid-19 di Kota Tegal yang sudah mencapai lebih dari 100% juga membuktikan bahwa Kota Tegal sudah

mencapai tujuannya. Dapat dikatakan pula bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal cukup efektif untuk mengajak masyarakat vaksinasi covid-19.

G. KESIMPULAN

Setiap program yang pemerintah buat pasti menimbulkan pro dan kontra terhadap program tersebut. Bagi mereka yang pro akan mempermudah pemerintah untuk mencapai tujuan dari adanya program tersebut. Namun, mereka yang kontra akan membuat tujuan dari program tersebut menjadi terhambat. Dibalik ketercapaian angka vaksinasi covid-19 di Kota Tegal, tentu banyak masyarakat Kota Tegal yang sebelumnya kontra terhadap program pemerintah ini. Bahkan hingga saat ini masih terdapat beberapa warga yang belum melakukan vaksinasi covid-19. Mereka menolak vaksinasi covid-19 dengan berbagai alasan. Padahal vaksinasi covid-19 merupakan alat perlindungan diri dari virus covid-19 yang saat ini sudah menyebar dan memberikan dampak negatif di kehidupan manusia. Pandemi covid-19 bukan hanya sekedar berdampak pada dunia kesehatan, melainkan juga pada segi sosial budaya dan ekonomi suatu negara. Oleh karenanya, perlu adanya tindakan cepat dari pemerintah

untuk menekan angka penyebarannya.

Vaksinasi covid-19 merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari penularan covid-19 itu sendiri. Untuk menyukseskan program vaksinasi covid-19 ini, perlu adanya komunikasi guna mempromosikan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat. Komunikasi yang dilakukan ini merupakan salah satu contoh praktik komunikasi politik. Termasuk dalam komunikasi politik sebab sesuai dengan teori yang dicetuskan oleh Harold Lasswell, komunikasi yang dilakukan bersifat *one way communication*, tersentralisasi, dan masyarakat sebagai penerima pesan pasif. Kota Tegal sebagai salah satu kota yang ikut menyukseskan program vaksinasi covid-19. Sejak awal diumumkannya program vaksinasi covid-19, Dinas Kesehatan Kota Tegal langsung bergerak dengan melakukan advokasi kepada Pemerintah Kota Tegal. Pada 22 Mei 2021 instagram @puskesmastegaltimur memposting informasi mengenai alur pelayanan vaksinasi covid-19. Selain melalui media sosial, Dinas Kesehatan Kota Tegal beserta jajarannya juga melakukan promosi kesehatan dengan terjun langsung ke lapangan. Kegiatan sosialisasi ini biasanya dilakukan di tempat umum seperti pasar, car free day, serta mall. Dalam

kegiatan ini juga terdapat hambatan yang cukup berarti. Pasalnya, kegiatan ini berlangsung di tempat umum, sehingga tak sedikit masyarakat yang kurang memperhatikan promosi kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal beserta jajarannya. Selain sosialisasi di tempat umum, juga mendatangi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi covid-19 (*door to door*). Kegiatan ini rutin dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan vaksinasi covid-19 serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya vaksinasi covid-19.

Kegiatan promosi kesehatan ini dilakukan oleh panitia *ad hoc*. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang disampaikan, misalnya pentingnya vaksinasi covid-19, efek samping hingga sanksi yang akan didapat jika menolak vaksinasi covid-19. Penelitian ini berfokus di wilayah Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Tidak sedikit masyarakat Kecamatan Tegal Timur yang menolak vaksinasi covid-19 dengan berbagai alasan. Ini merupakan salah satu tantangan dalam pelaksanaan program vaksinasi covid-19. Dari 13 warga yang diwawancarai, terdapat 2 warga yang hingga saat ini belum melakukan vaksinasi covid-19, 3 warga hanya melakukan vaksinasi covid-19 dosis 1, 2 warga melakukan

vaksinasi covid-19 dosis 2, dan sisanya sudah melakukan vaksinasi covid-19 dosis booster. Namun, sebelumnya mereka semua merupakan warga yang menolak vaksinasi covid-19.

Dari wawancara yang dilakukan, penulis memperoleh beberapa alasan terjadinya penolakan vaksinasi covid-19 di beberapa masyarakat Tegal Timur. Minimnya informasi terkait vaksinasi covid-19 menjadi alasan paling mendasar terjadinya penolakan vaksinasi covid-19. Minimnya kejelasan informasi juga menimbulkan efek domino di masyarakat. Minimnya informasi mengakibatkan hoax beredar bebas di masyarakat. Hoax tersebut antara lain mengenai efek samping pasca vaksin dan kehalalan vaksinasi covid-19. Hoax ini sendiri juga menimbulkan ketidakpercayaan dan masyarakat menjadi ragu untuk melakukan vaksinasi covid-19. Ditambah dengan profesi masyarakat yang merupakan pekerja harian, menambah keraguannya untuk melakukan vaksin. Selain alasan tersebut, terdapat alasan lain seperti adanya penyakit bawaan.

Dari 13 narasumber, terdapat 11 narasumber yang akhirnya mau melakukan vaksinasi. Terdapat beberapa alasan yang membuat mereka akhirnya mau melakukan

vaksinasi covid-19, antara lain:

- a. Kebutuhan pribadi
- b. Dorongan dari pemerintah
- c. Kebijakan tempat kerja

Kebutuhan pribadi menjadi alasan yang paling mendorong untuk melakukan vaksinasi covid-19. Ditambah dengan adanya sanksi administrasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Tegal. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal khususnya Dinas Kesehatan Kota Tegal berhasil. Pasalnya, hingga saat ini ketercapaian angka vaksinasi sudah lebih dari 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- CNNIndonesia. (2020). *Pemkot Tegal soal Local Lockdown: Kami Tak Melawan Pusat*. Tegal: CNN Indonesia. diakses pada 2 Juli 2022 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327085659-20-487380/pemkot-tegal-soal-local-lockdown-kami-tak-melawan-pusat>
- Habibullah, A., Pratiwi, D. D., Sari, E., Putra, F., & Novanto, T. (2022). Komunikasi Pemerintahan Dalam Menyebarkan Informasi Protokol Kesehatan Covid-19 Kepada Masyarakat Kota Tegal. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 6, No. 1, 54-60.
- Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik di Era Digital. *POLITIKA, Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No.1, 93-111.
- Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik di Era Digital. *POLITIKA, Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10, No.1, 93-111.
- Kemkes. (2020). *Strategi Komunikasi Covid-19*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Nurlita, H. I. (2021). Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 melalui Media Sosial. *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)* Vol 23, No 1, 1-19.
- Setiadi, T. (2021). *Capaian Vaksinasi Dosis Pertama di Kota Tegal 98,60 Persen, Kedua 60,90 Persen*. Tegal: Kompas.com. diakses pada 10 Oktober 2022 melalui <https://regional.kompas.com/read/2021/10/19/091728678/capaian-vaksinasi-dosis-pertama-di-kota-tegal-9860-persen-kedua-6090-persen>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- UI, F. (2020). *Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19*. Depok: fisip.ui.ac.id. diakses pada 10 Oktober 2022 melalui <https://fisip.ui.ac.id/komunikasi-publik-pemerintah-di-masa-pandemi-covid-19/>